

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL

The Influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and
Resistance of Budget Financing (SILPA) on Capital Expenditure (BM)

Farhan Fahrezi¹, Nuramalia Hasanah S.E., M.Ak², Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si, AK,
CA³

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta,

**Corresponding Authors (fahrezi.farhan77@gmail.com)*

Abstract

This study aims to examine the effect of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Resistance of Budget Financing (SILPA) on Capital Expenditure (BM) in district/city governments in West Java province in 2015 -2020. The study uses secondary data sourced from the official website of the Director General of Fiscal Balance (DJPK). The number of samples taken in this study were 138. The samples were taken using purposive sampling technique. The research data was processed using multiple linear regression analysis through the help of the SPSS application. Based on the results of the research conducted, it shows that Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Resistance of Budget Financing (SILPA) separately have a positive and significant influence on Capital Expenditure (BM).

Keywords : *Capital Expenditure, Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Resistance of Budget Financing*

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh yang dihasilkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal (BM) pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2020. Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari situs resmi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 138. Data penelitian diolah menggunakan analisis regresi linear berganda melalui bantuan aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara terpisah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (BM).

Kata Kunci : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

PENDAHULUAN

Pemerintah kabupaten/kota harus mampu mengelola pendapatan yang mereka peroleh untuk dialokasikan kepada belanja yang sifatnya produktif. Belanja yang produktif akan memberikan efek yang baik yaitu dapat meningkatkan jumlah penghasilan yang diterima sehingga pemerintah kabupaten/kota dapat membiayai kebutuhan kabupaten/kota mereka. Pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dijelaskan dalam PP Nomor 12 (2019) yakni pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya masing masing dengan cakupan yang lebih luas serta meminimalisir bantuan atau campur tangan dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah kabupaten/kota harus mengelola keuangan mereka secara mandiri. Menurut Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pada tahun 2017 pemerintah daerah belum mengelola keuangan mereka dengan efektif dan efisien. Sedangkan, dana yang diturunkan oleh pemerintah pusat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yaitu Boediarso Teguh Widodo menyebutkan transfer ke daerah tahun 2017 mencapai Rp 766 triliun atau mengalami peningkatan yang tajam dibandingkan pada saat dimulainya desentralisasi fiskal yaitu Rp 81 triliun. Kementerian Keuangan mencatat beberapa sebab yang mempengaruhi pengelolaan keuangan yang tidak efisien. Salah satunya yaitu belanja pegawai di pemerintah daerah yang jauh lebih besar dari porsi belanja modal. Total belanja pegawai sebesar 36,8 % sedangkan belanja modal hanya sebesar 20 % (Florentin, 2017).

Belanja modal adalah belanja yang termasuk ke dalam komponen belanja langsung dalam daftar anggaran yang dibuat oleh pemerintah yang menyebabkan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah bertambah jumlahnya. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan pada kebutuhan daerah seperti sarana dan prasarana, baik untuk fasilitas publik maupun kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah (Priambudhi, 2016). Belanja modal seperti pembangunan infrastruktur sangat penting untuk memajukan perekonomian di daerah. Karena dengan adanya proyek pembangunan infrastruktur dapat menarik investor dalam jumlah yang cukup banyak. Investor akan menanamkan modal mereka dengan membiayai proyek infrastruktur tersebut. Sedangkan masyarakat di daerah tersebut tetap diuntungkan yaitu terbukanya beberapa lapangan kerja sehingga jumlah pengangguran di daerah tersebut menjadi berkurang. Semakin banyak masyarakat yang bekerja di daerah tersebut semakin menambah geliat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut sehingga akan berakibat kepada pendapatan daerah yang meningkat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, kabupaten/kota karena keberhasilan mereka dalam mengembangkan potensi-potensi yang berada dalam daerah, kabupaten/kota yang mereka pimpin. Menurut PP Nomor 12 pasal 31 (2019) menjelaskan pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jumlah pendapatan asli daerah yang dihasilkan masing-masing daerah, kabupaten/kota berbeda-beda. pendapatan asli daerah yang kecil

disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki oleh daerah, kabupaten/kota tersebut dalam mengembangkan segala sumber penghasilan daerah mereka masih kecil. Oleh karena itu, perlu adanya bantuan dana dari pemerintah pusat guna membantu kabupaten/kota yang mana jumlah pendapatan asli daerah mereka masih kecil. Salah satu dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu dana alokasi umum.

Dana Alokasi Umum yang disebut dengan DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP Nomor 12 pasal 37, 2019). Dana tersebut diberikan dengan tujuan untuk melakukan pemerataan kemampuan fiskal di masing-masing daerah. Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama dan kuat. Dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berasal dari pendapatan APBN yang tujuan dana tersebut diberikan adalah supaya pemerintah daerah mengelola dana tersebut untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat atau publik. Tujuan diberikannya Dana Alokasi Umum oleh pemerintah pusat yaitu untuk mengurangi ketidakseimbangan horizontal (horizontal imbalance) antar pemerintah daerah (Annisa, 2019).

Dalam menjalankan rangkaian program pembangunan, pemerintah kabupaten/kota tentu kembali meninjau anggaran belanja yang sudah ditetapkan dan membandingkannya dengan realisasi jumlah anggaran yang terpakai. Terkadang jumlah anggaran yang telah ditetapkan sama dengan jumlah realisasi anggaran yang terpakai. Ini adalah kondisi yang ideal. Tetapi jika jumlah realisasi anggaran cenderung lebih kecil daripada jumlah anggaran yang ditetapkan, maka sisa lebih anggaran itu dimanfaatkan untuk membiayai program-program pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari sisa lebih pembiayaan anggaran oleh Dirjen Perimbangan Keuangan (2020) yaitu apabila terjadi pembiayaan neto positif jumlah pendapatan yang diterima lebih besar daripada jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka terdapat sisa dana yang belum dimanfaatkan. Sisa dana ini perlu dimanfaatkan untuk membiayai program-program pembangunan daerah. Jika yang terjadi sebaliknya, maka sisa lebih pembiayaan anggaran di tahun sebelumnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran periode berkenan.

TINJAUAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency theory*)

Dalam teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan bahwa hubungan keagenan yaitu kontrak di mana satu, dua, atau lebih (prinsipal) memberikan wewenang kepada orang lain (agen) untuk mencapai kepentingan mereka. Prinsipal dan agen memiliki perbedaan kepentingan yang menyebabkan tindakan yang dilakukan oleh agen tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh prinsipal. Prinsipal melimpahkan tanggung jawab dan pengambilan keputusan kepada agen, di mana seluruh wewenang dan tanggung jawab agen diatur dalam kontrak kerja yang sudah disepakati bersama. Namun pada praktiknya, wewenang yang dilimpahkan oleh prinsipal kepada

agen memunculkan masalah yang baru, dikarenakan perbedaan tujuan yang ingin dicapai. Pihak agen bisa bertindak untuk mencapai kepentingan dirinya pribadi dan mengabaikan kepentingan prinsipal. Hal tersebut terjadi karena prinsipal dan agen memiliki informasi yang berbeda sehingga menyebabkan terjadinya asymmetric information.

Dalam organisasi pemerintahan, pemerintah pusat memberikan wewenang dan pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerah mereka. Pemberian wewenang tersebut sebagai konsekuensi dari diberlakukannya PP Nomor 12 (2019) yaitu pelaksanaan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah dapat mengelola secara mandiri keuangan mereka. Pengelolaan keuangan yang mandiri menyebabkan pemerintah daerah dapat mengembangkan daerah yang mereka pimpin menjadi lebih baik daripada periode sebelumnya. Apabila pemerintah daerah berhasil mewujudkan tujuan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal maka pemerintah daerah dapat mengembangkan daerah mereka secara mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat lebih fokus memanfaatkan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang lain.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola keuangan di daerah yang mereka pimpin. Pemerintah kabupaten/kota menggunakan anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat untuk membangun kabupaten/kota di daerah mereka yang membutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Namun pada praktiknya tidaklah mudah, karena kepentingan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidaklah sama sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat memakan waktu dalam mencapai tujuannya. Hal tersebut dikarenakan informasi yang diterima oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbeda. Pelaksanaan desentralisasi fiskal mengalami kendala dikarenakan beberapa daerah memiliki fokus masing-masing dalam membangun daerah mereka.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk aset tetap yang memiliki wujud dan aset tersebut memiliki masa manfaat selama >12 bulan (SAP, 2019: 70). Belanja modal digunakan untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, pembelian peralatan, dan pembelian aset tetap yang lainnya. Belanja modal adalah belanja yang termasuk ke dalam komponen belanja langsung dalam daftar anggaran yang dibuat oleh pemerintah yang menyebabkan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah bertambah jumlahnya. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan pada kebutuhan daerah seperti sarana dan prasarana, baik untuk fasilitas publik maupun kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah (Priambudhi, 2016).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, kabupaten/kota karena keberhasilan mereka dalam mengembangkan potensi-potensi yang berada dalam daerah, kabupaten/kota yang mereka pimpin. Menurut PP Nomor 12 pasal 31 (2019) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang disebut dengan DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP Nomor 12 pasal 37, 2019). Dana tersebut diberikan dengan tujuan untuk melakukan pemerataan kemampuan fiskal di masing-masing daerah. Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama dan kuat.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berdasarkan SAP (2019: 72) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih kurang/lebih antara realisasi pendapatan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Menurut Kementerian Keuangan dalam website resminya yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sisa lebih pembiayaan anggaran yaitu selisih antara defisit/surplus anggaran pembiayaan neto. Dalam penyusunan APBD angka dari sisa lebih pembiayaan anggaran ini berjumlah nol. Yaitu, penerimaan pembiayaan harus mampu menutup defisit anggaran yang terjadi.

Pengembangan Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 12 pasal 31 (2019) adalah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh karena keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang terdapat di daerahnya. Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang besar pada suatu daerah dapat menjadi indikator bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan fiskal yang kuat. Dengan memiliki jumlah Pendapatan Asli Daerah yang besar, pemerintah daerah dapat mengembangkan kembali pendapatan mereka tersebut dengan mengalokasikan pendapatan tersebut kepada Belanja Modal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suprayitno (2015), Herman dan Treesje (2015), Nugroho (2015), Elni (2016), Apriyanto (2016), Ningsasra (2016), Susanti dan Fahlevi (2016), Rudiansah (2017), Astuti (2017), Kusumawardhani (2018), Suryana (2018), Sari, Djuanda & Sarwani (2018), Haryanto (2019), Rizal dan Erpita (2019), dan Angelina *et al.* (2020) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, peneliti menentukan hipotesis pertama sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum yang disebut dengan DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP Nomor 12 pasal 37, 2019). Dana tersebut diberikan dengan tujuan untuk melakukan pemerataan kemampuan fiskal di masing-masing daerah. Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama dan kuat. Dikarenakan dana alokasi umum bersifat *block grant* yang artinya untuk penggunaannya dikembalikan kepada pemerintah daerah sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai belanja pemerintah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan dana ini untuk menambah porsi Belanja Modal mereka sehingga belanja yang mereka lakukan dapat memberikan pendapatan untuk daerah mereka dan tidak terus-menerus memperoleh Dana Alokasi Umum yang jumlahnya cukup signifikan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suprayitno (2015), Herman dan Treesje (2015), Setiyani (2015), Nugroho (2015), Junaedy (2015), Ningsasra (2016), Susanti dan Fahlevi (2016), Astuti (2017), Kusumawardhani (2018), Warasati, Palampanga, dan Iqbal (2018), Suryana (2018), Annisa (2019), Haryanto (2019), dan Angelina *et al.* (2020) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, peneliti menentukan hipotesis kedua sebagai berikut :

H2 = Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berdasarkan SAP (2019) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih kurang/lebih antara realisasi pendapatan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh karena keberhasilan pemerintah daerah dalam memaksimalkan realisasi belanja daerah mereka. Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dihasilkan harus dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan publik. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan publik tersebut adalah dengan membangun fasilitas yang dibutuhkan publik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2015), Apriyanto (2016), dan Kusumawardhani (2018) menjelaskan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pada penelitian yang dilakukan oleh menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal . Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki pengaruh positif terhadap

Belanja Modal . Dengan demikian, peneliti menentukan hipotesis ketiga sebagai berikut : H3 = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Untuk mengetahui hubungan variabel penelitian dibutuhkan kerangka teoritik seperti di bawah ini :



Gambar 1. Kerangka Teoritik

Sumber : *Data diolah peneliti (2021)*

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada 18 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Barat. Data penelitian yang dijadikan sebagai sampel adalah laporan keuangan daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Barat tahun 2015-2020. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Dalam mengolah data penelitian, peneliti menggunakan aplikasi *Microsoft Word*, *Microsoft Excel*, dan *SPSS versi 24*. Kriteria sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penentuan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang melaporkan jumlah masing-masing Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal secara lengkap selama tahun 2015-2019	27
Jumlah Sampel		27
Periode Penelitian		6
Jumlah Observasi Penelitian		162
Populasi Tidak Dapat Dijadikan Sampel		24
Populasi Dapat Dijadikan Sampel		138

Sumber : Data diolah peneliti, (2021)

1. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang melaporkan jumlah masing-masing Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal secara lengkap selama tahun 2015-2020
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang menyediakan variabel penelitian yang peneliti butuhkan yaitu masing Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal
3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tersebut dapat dilihat melalui website resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>.

Pada penelitian ini, data penelitian untuk variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran dan variabel terikat yaitu belanja modal sudah tercantum di situs resmi Direktur Jenderal Perimbangan. Tidak semua populasi dapat dijadikan sebagai sampel penelitian. Terdapat 4 kabupaten/kota yang memiliki jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sama dengan nol. Oleh karena itu, jumlah sampel yang diambil sebanyak 162 dikurangi dengan 4 populasi yang dikalikan dengan 6 periode penelitian sehingga hasilnya 162-24 sama dengan 138 sampel.

Pada variabel pendapatan asli daerah, diukur dengan cara menjumlahkan hasil pajak daerah, pendapatan daerah lainnya yang dipisahkan, restribusi daerah, dan lainnya pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah = Hasil Pajak Daerah + Pendapatan Daerah Lainnya yang Pisahkan + Retribusi Daerah + Lainnya Pendapatan Daerah yang Sah

Pada variabel dana alokasi umum, diukur dengan cara menjumlahkan alokasi dasar dan celah fiskal.

Dana Alokasi Umum = Alokasi Dasar + Celah Fiskal

Pada variabel sisa lebih pembiayaan anggaran, diukur dengan cara menjumlahkan surplus realisasi anggaran atau defisit realisasi anggaran dengan pembiayaan neto.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran = Surplus/Defisit Realisasi Anggaran + Pembiayaan Netto

Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Pada analisis regresi dan pengujian hipotesis digunakan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Pada analisis regresi, pengujian dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Model persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = \alpha + \beta_1 \text{ Pendapatan Asli Daerah} + \beta_2 \text{ Dana Alokasi Umum} + \beta_3 \text{ Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran} + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat mendeskripsikan data variabel yang dapat disajikan melalui nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum atau tertinggi (*max*), nilai minimum atau terendah (*min*), dan standar deviasi (*deviation standard*). Hasil dari uji statistik deskriptif dapat diketahui dari Tabel 2 di bawah ini yang diperoleh melalui olah data menggunakan aplikasi SPSS:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif (Dalam Ribuan Rupiah)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
PAD	138	Rp 64,506,109,613	Rp 3,339,363,515,736	Rp 771,080,493,547	Rp 736,966,764,530
DAU	138	Rp 352,697,608,000	Rp 2,176,386,196,000	Rp 1,171,681,509,353	Rp 484,250,935,769
SILPA	138	Rp 7,121,270,115	Rp 2,452,192,512,211	Rp 367,136,700,175	Rp 414,742,419,667
BM	138	Rp 86,426,653,779	Rp 1,812,686,558,000	Rp 574,431,327,772	Rp 342,751,519,586

Sumber : *Data diolah peneliti (2021)*

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov* (sebelum transformasi)

N		138
Normal Parameter s	Mean	0.0000009
	Standar Deviasi	147733357118.19800 000
Cost Extreme Differences	Absolute	0.086
	Positive	0.086
	Negative	-0.054
Test Statistics		0.086
Asymp. Sig. (2- tailed)		.015 ^{c,d}

Pada tabel 3, menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari uji normalitas yang dilakukan adalah 0,015. Nilai signifikansi tersebut menandakan bahwa data penelitian belum berdistribusi normal. Oleh karena itu, peneliti melakukan transformasi data. Sebelum itu, peneliti memeriksa terlebih dahulu histogram data, apabila histogram data cenderung ke arah kiri bawah maka peneliti menggunakan teknik transformasi dengan SQRT. Setelah data sudah ditransformasi, peneliti kembali melakukan uji normalitas dengan *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Tabel 4 menunjukkan hasil dari uji normalitas setelah dilakukan transformasi data yaitu sebagai berikut:

:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov* (sesudah transformasi)

N		138
Normal Parameter s	Mean	0.0000000
	Standar Deviasi	102848.32489950
Cost Extreme Differences	Absolute	0.047
	Positive	0.047
	Negative	-0.042
Test Statistics		0.047
Asymp. Sig. (2- tailed)		.200 ^{c,d}

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Apabila nilai signifikansi pada hasil uji normalitas menunjukkan angka $> 0,05$ maka artinya data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi menunjukkan angka $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal. Pada tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan angka 0,200 artinya nilai tersebut $> 0,05$ sehingga data penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

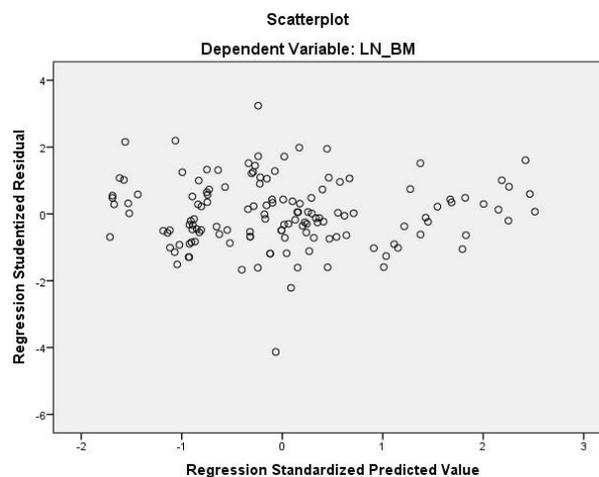
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD	0.493	2.029
DAU	0.722	1.386
SILPA	0.580	1.726

Sumber : *Data diolah peneliti (2021)*

Uji multikolinieritas berguna untuk mengetahui hubungan keterkaitan antara variabel bebas dalam model regresi. Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji multikolinieritas dengan cara melihat nilai *tolerance* dan *VIF*. Apabila nilai *tolerance* menunjukkan angka $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 maka data berdistribusi normal. Jika nilai *tolerance* menunjukkan $< 0,10$ dan nilai *VIF* > 10 maka data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan tabel 5, hasil uji multikolinieritas ketiga variabel menunjukkan nilai *tolerance* menunjukkan angka $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 sehingga data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik *Scatterplot*

Sumber : *Data diolah peneliti (2021)*

Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan grafik *scatterplot* antara nilai variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID), di mana sumbu X adalah yang diprediksi dan sumbu Y adalah residual. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (gelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika pola yang terbentuk tidak jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar 2, menunjukkan bahwa bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar dengan baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak ada pola tertentu yang teratur. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.839 ^a	0.705	0.698	101498.45674	2.041

Sumber : *Data diolah peneliti (2021)*

Menurut Ghazali (2018: 111) menjelaskan bahwa “Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ ”. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Untuk mengetahui apakah model regresi memiliki autokorelasi atau tidak dapat ditunjukkan dengan nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitas menunjukkan angka 0,05 maka model regresi tidak terjadi autokorelasi. Berikut kriteria penilaian terjadinya autokorelasi:

1. Angka D-W di bawah -4 berarti ada autokorelasi positif
2. Angka D-W di antara -4 sampai +4 tidak ada autokorelasi
3. Angka D-W di atas +4 autokorelasi negatif

Berdasarkan tabel 6, diketahui nilai Durbin Watson 2,041. Mengacu pada tabel Durbin Watson, maka diperoleh nilai $dL = 1,6778$ dan $dU = 1,7645$, nilai Durbin Watson sebesar 1,885 lebih besar dibandingkan dengan nilai batas atas (dU) yaitu 1,7665 dan kurang dari ($4-dU$) yaitu $4 - 1,7665$ sama dengan 2,2335. Apabila nilai DW berada pada angka -4 dan +4 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi.

Analisis Regresi

Tabel 7. Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
(Constant)	83497.48880 99715	49234.405 2436848		1.696	0.092
PAD	0.330	0.038	0.551	8.693	0.000
DAU	0.327	0.052	0.332	6.290	0.000
SILPA	0.091	0.043	0.125	2.113	0.036

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel 7, model persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

Belanja Modal = 83497.4888099715 + 0,330 Pendapatan Asli Daerah + 0,327 Dana Alokasi Umum + 0,091 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran + e

Uji Hipotesis

Uji T

Tabel 8. Uji T

Variabel	t-Statistic	Probabilitas	Hasil
PAD	8.351	0,00	H1 Diterima
DAU	7.041	0,00	H2 Diterima
SILPA	3.905	0,00	H3 Diterima

Sumber : *Data diolah peneliti (2021)*

1. Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada tabel 8, menjelaskan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal adalah sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai t

hitung sebesar $8,351 > t$ tabel $1,97756$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

2. Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada tabel 8, menjelaskan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal adalah sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $7,041 > t$ tabel $1,97756$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis kedua diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal .

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada tabel 8, menjelaskan bahwa pengaruh yang dihasilkan oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal positif tetapi tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yaitu nilai signifikansi menunjukkan $0,00 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,905 > 1,97756$ nilai t tabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H3 atau hipotesis ketiga ditolak. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.

Uji F

Tabel 9. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3270483399569.660	3	1090161133189.890	105.821	.000 ^b
	Residual	1370157583849.690	133	10301936720.674		
	Total	4640640983419.350	136			

Sumber : *Data diolah peneliti (2021)*

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan sebagai model penelitian atau tidak. Apabila nilai signifikansi menunjukkan angka $< 0,05$ maka model regresi layak digunakan sebagai model penelitian. Jika nilai signifikansi menunjukkan angka $> 0,05$ maka model regresi tidak layak digunakan sebagai model penelitian. Berdasarkan tabel 9, bahwa nilai signifikansi menunjukkan

angka $< 0,05$ artinya model regresi dinyatakan layak digunakan sebagai model penelitian sehingga pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran memberikan pengaruh secara simultan terhadap belanja modal.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

R	.893 ^a
R-Square	0.705
Adjusted R-Square	0.698
Std. Error of the Estimate	101498.45674

Sumber : *Data diolah peneliti (2021)*

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Hal itu dapat diketahui dengan cara melihat angka yang dihasilkan pada kolom *Adjusted R-Square* pada tabel 10. Berdasarkan tabel 10, nilai dari *Adjusted R-Square* adalah 0,698 artinya bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran sebagai variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat yaitu Belanja Modal sebesar 69,8% sedangkan selebihnya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang besar merupakan sebuah tanda bahwa daerah tersebut telah memiliki pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dikatakan baik apabila pemerintah daerah tersebut telah mampu membagi anggaran belanja mereka dengan porsi yang tepat dan seimbang. Tidak terlalu cenderung kepada salah satu pos anggaran lainnya kecuali jika daerah tersebut memiliki fokus tersendiri. Untuk mengelola pembangunan daerah dibutuhkan salah satunya sumber pendapatan yang besar yaitu pada Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan tersebut bersumber dari keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah mereka. Pendapatan Asli Daerah dapat dinilai bagus apabila pendapatan tersebut digunakan lebih banyak untuk membiayai kebutuhan masyarakat (Jayanti, 2020).

Pendapatan Asli Daerah yang kecil menjadikan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah tersebut terhambat. Akibatnya daerah tersebut belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk menjalankan aktivitas perekonomian yang besar sehingga ekonomi

yang ada pada daerah tersebut bertumbuh namun lambat sekali. Sedangkan daerah yang memiliki infrastruktur yang sudah memadai, aktivitas perekonomian di daerah tersebut berjalan dengan pesat dan ekonomi di daerah tersebut tumbuh dengan pesat pula (Jayanti, 2020). Di sini dapat terlihat dengan jelas kesenjangan di berbagai daerah kabupaten/kota dikarenakan tidak semua daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dan salah satu penyebabnya adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut sehingga perekonomian yang tumbuh di daerah tersebut cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan perekonomian di daerah yang lain (Huda & Sumiati, 2019). Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang cukup kuat dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal . Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Ningsasra (2016) ,(Rudiansah, 2017), Kusumawardhani (2018), Haryanto (2019) dan (Angelina *et al*, 2020) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Jumlah pendapatan daerah yang kecil dapat diatasi oleh sumber pendapatan yang lain supaya kebutuhan belanja daerah dapat terpenuhi. Salah satu sumber pendapatan yang digunakan oleh pemerintah daerah yaitu dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana perimbangan tersebut salah satunya adalah Dana Alokasi Umum . Dana tersebut bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan fiskal pada masing-masing daerah sehingga diharapkan program pembangunan yang telah dicanangkan dalam rencana anggaran tetap dapat terlaksana (Haryanto, 2019).

Berdasarkan data yang diteliti bahwa dari 27 kabupaten/kota yang memiliki jumlah Dana Alokasi Umum di atas rata-rata yaitu hampir seluruhnya. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengelola dana tersebut untuk membiayai kebutuhan belanja daerah mereka dan dapat memberikan porsi yang seharusnya terhadap belanja modal (Simbolon, Maksu, & Abubakar, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang cukup kuat dari Dana Alokasi Umum terhadap alokasi Belanja Modal sehingga Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal . Hasil penelitian ini juga menunjang hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ningsasra, 2016), (Astuti, 2017), (Suryana, 2018), (Annisa, 2019), dan (Angelina *et al*, 2020) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berdasarkan SAP (2019) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih kurang/lebih antara realisasi pendapatan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh karena keberhasilan pemerintah daerah dalam memaksimalkan realisasi belanja daerah mereka. Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dihasilkan harus dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan publik. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pengaruh yang dihasilkan oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran cukup kuat akan tetapi hasil penelitian menunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat untuk memaksimalkan program pembangunan di masing-masing kabupaten/kota. Daerah yang memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang tinggi salah satunya yaitu kabupaten Bogor, melakukan kegiatan belanja modal yang berfokus untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah mereka seperti pembangunan jalan sirkuit Sentul-Istana Cipanas berada di kabupaten Bogor dan Cianjur. Jalur ini dibuat dengan tujuan untuk menghubungkan antara Sirkuit Sentul yang berada di akses pintu tol Jagorawi dengan Istana Cipanas yang berada di Jalan Nasional Puncak-Cianjur (Bappedalitbang Kab. Bogor, 2019). Sedangkan untuk kabupaten Purwakarta yang salah satunya termasuk ke dalam kabupaten yang memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran cukup kecil lebih memfokuskan kepada kegiatan belanja modal seperti pembangunan sarana prasarana air bersih, pembangunan saluran air, rehabilitasi jalan yang rusak, dan yang lainnya (Bappedalitbang Kab. Purwakarta, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara terpisah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Semakin besar pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang diterima maka alokasi belanja modal juga akan meningkat. Begitu juga dengan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran yang besar akan membuat alokasi belanja modal semakin besar. Tetapi hal ini sangatlah wajar, dikarenakan dana yang diterima jumlahnya cukup besar sehingga anggaran yang disisakan untuk keperluan belanja modal juga cukup besar.

Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti akan memberikan beberapa saran kepada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat di antaranya sebagai berikut:

1. Yaitu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah yang mereka peroleh untuk dialokasikan kepada Belanja Modal . Belanja Modal yang dialokasikan juga harus tepat sasaran yaitu sesuai dengan kebutuhan publik, supaya pendapatan daerah yang diterima pemerintah kabupaten/kota semakin besar.
2. Mengalokasikan Dana Alokasi Umum dengan efisien supaya pemerintah kabupaten/kota tidak ketergantungan dengan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah kabupaten/kota dapat mengelola keuangan mereka secara mandiri.
3. Memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang diperoleh dalam satu periode pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Yaitu, mengalokasikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tersebut kepada belanja yang sifatnya produktif, supaya pendapatan yang diterima oleh pemerintah dapat meningkat dan meminimalisir terjadinya defisit anggaran di akhir periode pemerintahan.
4. Menjaring aspirasi masyarakat untuk mengetahui apa yang harus dibenahi terlebih dahulu sehingga rencana pembangunan yang dibuat menjadi jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, C., Janice., Clarina, C., Fanjaya, W. W., & Jesisca. (2020). *Pengaruh PE, PAD, DAU dan SiLPA terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Utara)*. Riset & Jurnal Akuntansi, (4)1, 1-10. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.182>
- Annisa, M. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten atau Kota Se- Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat*. (Skripsi), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta, Yogyakarta. Retrieved from <https://repository.stieykpn.ac.id/id/eprint/815>
- Aditiya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015*. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 15(1), 43-56. <https://doi:10.30595/kompartemen.v15i11378>
- Apriyanto, J. D. (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2014*. (Skripsi), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/47691/1/NASKAH-PUBLIKASI.pdf>

- Astuti, N. D. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014*. Profita : Kajian Ilmu Akuntansi, 5(6), 1-16. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/profita/article/view/9846>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). *Database Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>. Retrieved from March 12, 2019, from Badan Pemeriksa Keuangan <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Bappedalitbang Kabupaten Bogor. (2019). *Peraturan Daerah Kabupaten Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023*. Retrieved from <https://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/sosialisasi-rpjmd-kabupaten-bogor-tahun-2018-2023/>
- Bappedalitbang Kabupaten Purwakarta. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023*. Retrieved from <http://bappeda.jabarprov.go.id/documents/rpjmd-kab-purwakarta-tahun-2018-2023/>
- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). *Evaluasi Keuangan Daerah*. Retrieved from http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?paged=2&epkb_post_type_1_category=evaluasi-keuangan-daerah. April 17, 2020, from Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan https://www.djpk.kemenkeu.go.id/?paged=2&epkb_post_type_1_category=evaluasi-keuangan-daerah
- Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati, E. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015)*. *Competitive*, 2(2), 85-94. DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/competitive.v2i2.917>
- Elni, E. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah)*. *E-Jurnal Katalogis*, 4(2), 1-11. Retrieved from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6528/5204>
- Florentin, V. (2017). *Kemenkeu: Pemerintah Daerah Tak Efektif Kelola Keuangannya*. Retrieved from bisnis.tempo.co website

<https://bisnis.tempo.co/read/1036110/kemenkeu-pemerintah-daerah-tak-efektif-kelola-keuangannya/full&view=ok>. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/1036110/kemenkeu-pemerintah-daerah-tak-efektif-kelola-keuangannya/full&view=ok>

- Gerungan, H. P., Saerang, D. P. E., & Ilat, V. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(1), 233-245. doi: <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15427>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hairiyah, H., Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). *Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal*. *Kinerja*, 14(2), 85-91. <https://doi.org/10.29264/jkin.v14i2.2483>
- Haryanto., & Sulistyaningsih, I. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. (Tesis), Universitas Diponegoro, Jawa Tengah. Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/71993/>
- Herman, Y., & Treesje, R. (2015). *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapat Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Manado*. *Jurnal Berkala Ilmiah dan Efisiensi (JBIE)*, 15(4), 390-400. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9640>
- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah*. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Universitas Negeri Jakarta (UNJ)*, 14(1), 85-100. <https://doi.org/10.21009/wahana.014.1.6>
- Jayanti, F.D. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018*. *Jurnal EMBA*, 8(3), 335-341. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/30045>
- Jensen, M., C. dan Meckling, W., H. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360. Retrieved from <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf>.

- Junaedy. (2015). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal*. *Future : Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 58-78. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/229022626.pdf>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2019). *Definisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran*. Retrieved from <http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/>. Retrieved from September 4, 2020, from Komite Standar Akuntansi Pemerintahan <http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/>.
- Kusumawardhani, I. (2018). *Pengaruh PAD, DAU, DAK, SiLPA dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010-2015*. (Skripsi), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/61967/>.
- Abduh,M. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 190 – 199. Retrieved from <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/532>
- Ningsasra, Y. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. (Skripsi), Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2369>
- Nugroho, R.M. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2011- 2013*. (Skripsi), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/36608>
- Nurlaela, C., Hidayati, N., & Mahsuni, A. W. (2018). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur)*. *E- JRA : Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(11), 49-61. Retrieved from <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/1487/1460>
- Priambudhi, W. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2013*. *Nominal : Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(1), 136-147. <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14338>

- Prima, B. (2018). *Porsi Belanja Pegawai Besar, Ini Nilai Belanja Pemerintah Belum Produktif*. Retrieved from <http://www.nasional.kontan.co.id>.
- website: <https://nasional.kontan.co.id/news/porsi-belanja-pegawai-besar-ekonom-ini-nilai-belanja-pemerintah-belum-produktif>.
- Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/porsi-belanja-pegawai-besar-ekonom-ini-nilai-belanja-pemerintah-belum-produktif>.
- Rudiansah, N. (2017). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Tengah Tahun 2014)*. (Skripsi), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/48854/>
- Sari, N., Djuanda, G., & Sarwani. (2018). *Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi*. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 91-100. doi: <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.92>
- Simbolon, Y.C., Maksum, A., & Abubakar, E. (2020). *Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018*. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 826-839.
- Setiyani, R. D. (2015). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Studi Empiris pada Kabupaten di Karesidenan Pati Periode 2009-2013*. (Skripsi), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/37103>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, I. M. D. S., Sulindawati, N. L. G. E., & Adiputra I. M. P. (2015). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Pemeliharaan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Bali Periode 2009- 2013*. *E-Journal Akuntansi S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 3(1), 1-11. doi: <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v3i1.5095>

- Suprayitno, B. (2015). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa*. JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan), 2(01), 106-112. Retrieved from <http://ujijurnal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/101>
- Suryana, S. (2018). *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal*. Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis, 9(2), 67-74. doi: <https://doi.org/10.17509/jimb.v9i2.14000>
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 1(1), 183-191. Retrieved from <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/765>
- Vanessa, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi*. Jurnal Paradigma Ekonomika, 14(1), 27-36. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6609>
- Venkataraman, S., and Urmi, A. (2017). *Development Expenditure, Fiscal Consolidation and Public Revenue in India*. International Journal of Accounting and Economic Studies, 5(1), pp: 16-18.
- Warasati, N. N., Palampanga, A. M., & Iqbal, M. B. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Studi Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah*. KATALOGIS, 6(6), 45-55. Retrieved from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/11785>
- Yani, R., & Erpita. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa*. Jurnal Samudra Ekonomika, 3(1), 74-83. <https://doi.org/10.1234/jse.v3i1.1296>

